

Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan *Whistleblowing System* Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Empiris Pada Seluruh Kelurahan Di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal)
The Effect Of Organizational Commitment And Community Participation On The Village Fund Management Accountability With Whistleblowing System Moderated

Dewi Kusuma Wardani¹, Adia Adi Prabowo², Kathon Adi Anugrah³

¹Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta

¹Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta

¹Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta

Email : dewifeust@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dan alasan pada penelitian adalah untuk menguji pengaruh komitmen organisasi perangkat desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan moderasi *whistleblowing system* pada Kelurahan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, pengumpulan informasi data dalam penelitian ini dengan data primer dengan menyebarkan kuesioner/angket kepada perangkat desa di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Sampel pada penelitian ini sebanyak 104 responden, Metode analysis regresi berganda dengan menggunakan program alat yaitu SPSS versi 20 dalam mengolah data. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi perangkat desa tidak memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Whistleblowing system* tidak dapat memoderasi pengaruh positif komitmen organisasi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Whistleblowing system* dapat memperkuat pengaruh positif partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of village apparatus organizational commitment and community participation on village fund management accountability by moderating the whistleblowing system in the in Sukorejo District, Kendal Regency. This research is a quantitative research, collecting data information in this study with primary data by distributing questionnaires to village officials in Sukorejo District, Kendal Regency. The sample in this study was 104 respondents, multiple regression analysis method using the tool program, namely SPSS version 20 in processing data. This study shows the results that the organizational commitment of the village apparatus has no effect on the accountability of village fund management. Community participation has a positive influence on the accountability of village fund management. Whistleblowing system cannot moderate the positive influence of village apparatus organizational commitment on village fund management accountability. Whistleblowing system can strengthen the positive influence of community participation on the accountability of village fund management.

Info Artikel

Diterima: 12 Oktober, 2021

Revisi: 8 November 2021

Dipublikasi Online:
30 Desember 2021

Kata kunci: Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, *Whistleblowing system*

Article History

Received: October 12, 2021

Revised: November 08, 2021

Published Online: December 30, 2021

Keywords: Organizational Commitment, Community Participation, *Whistleblowing system*

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah merupakan salah satu pemberian wewenang dari pemerintahan pusat yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pemerintahan di Negara Indonesia. Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat (Nadir, 2013). Desentralisasi dapat membagi wewenang yang cukup luas pada pemerintahan di tingkat daerah guna mengelola wilayah ke pemerintahannya yang diberikan (Mada *et al.*, 2017).

Julianto (2019) mengemukakan bahwa perundang-undangan tentang desa sudah menetapkan desa menjadi kunci utama pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat. Wewenang yang diberikan kepada desa dan sumber daya yang cukup untuk mengatur wilayah yang dipunya untuk memaksimalkan perekonomian. Pemerintah setiap tahunnya selalu memberikan dana untuk pembangunan desa. Dana tersebut diharapkan dapat dikelola secara akutabel oleh pemerintah desa sesuai peraturan supaya tidak ada tindakan kecurangan, korupsi juga sebagainya. Pendanaan desa dipergunakan dalam membangun serta mensejahterakan warga desa dan merupakan salah satu dari wujud pemerintahan desa dalam mengukur berhasil atau tidak dalam menjalankan amanat dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah dalam mengelola dana desa yang baik.

Adapun kasus dalam penyalahgunaan serta tindak kecurangan pada dana desa yaitu kasus korupsi alokasi dana desa dan tanah bengkok di kabupaten kendal, jawa tengah atas perilaku tiga kades yaitu kades pucangrejo atas dugaan kasus korupsi pada tahun 2013 sebesar 118,9 juta, kades sukorejo melakukan dugaan kasus korupsi anggaran dana desa (ADD) pada tahun 2014, kades bangunsari, disangka melakukan korupsi di tahun 2014 sebesar 66,81 juta, dan seorang carik desa sidomukti melakukan penyalahgunaan tanah bengkok. Untuk itu, pada tahun 2015 pemkab Kendal melakukan penyuluhan penggunaan dana desa untuk menghindari terjadinya kasus korupsi semakin banyak (kompas.com, 2015).

Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas adalah komitmen organisasi. Handoko & Rambe (2018) menerangkan bahwasanya komitmen organisasi merupakan penilaian pegawai yang dapat dilihat dari perilakunya, terkait keterlibatan kuat yang dilakukan seseorang pada badan instansi. Apabila keterkaitan yang dilakukan seseorang tersebut tinggi yang mana pasti muncul sikap tanggung jawab yang lebih besar pula pada publik, sehingga memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang semakin bagus. Jika seseorang dengan komitmen organisasinya yang tinggi maka dia akan mempunyai komitmen terhadap tanggung jawab dan aturan akan dilakukan dan dilaksanakan secara baik dan dia juga akan menghindari segala tindakan yang akan merugikan organisasi dan masyarakat desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas yaitu partisipasi masyarakat. Menurut Muslimin *et al.*, (2012) Keikutsertaan masyarakat merupakan keterlibatan pada fase memikirkan masalah dalam memilih serta mencari solusi alternatif penanganan masalah, dan melakukan segala upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengikuti evaluasi perubahan yang ada. Menurut Gayatri (2019) partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pada pengaturan dana desa, karena alasan paling penting dari penggunaan dana desa yaitu memberdayakan warga desa. Tercapainya pemberdayaan masyarakat bila masyarakat ikut serta dalam segala kegiatan desa karena penilaian masyarakat desa sangat berpengaruh pada kinerja perangkat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah dan penyusunan kebijakan pemerintah dapat menjadi salah satu faktor akuntabilitas pemerintah berjalan dan dilakukan dengan baik. Keikutsertaan masyarakat yang kian sering dan meningkat cenderung meningkat pula manajerial dana desa.

Whistleblowing system memperkuat pengaruh positif komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bila perangkat desa memiliki keterkaitan yang tinggi maka pencatatan dan manajerial dana desa juga akan semakin tinggi, adanya penerapan *whistleblowing system* yang baik akan memberikan informasi yang sesungguhnya kepada masyarakat desa atas kinerja perangkat desa. *Whistleblowing system* mampu meminimalkan tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, mekanisme yang jelas dalam pelaporan serta peningkatan efektivitas *whistleblowing system* akan mendorong partisipan *whistleblowing* lebih berani bertindak dalam pelaporan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh anggota organisasi.

Whistleblowing system dapat memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Saputra (2018) pentingnya *whistleblowing system* untuk pemerintahan guna mengetahui pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan. *Whistleblowing system* yang efektif dan baik dapat terwujud bila semua elemen terlibat, termasuk juga masyarakat ikut berpartisipasi di dalamnya. Utami *et al.*, (2019) menjelaskan bahwa penyalahgunaan pengelolaan dana desa yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi pada masyarakat desa dan kepercayaan masyarakat akan menurun, hingga pemerintah mengupayakan untuk mengurangi tindakan penyalahgunaan dana desa dengan menerapkan pengawasan serta menerapkan sistem dalam menampung aspirasi dan pelaporan warga desa pada penggunaan pendanaan desa yang mengakibatkan meningkatnya penggunaan dana desa yang akuntabel.

LANDASAN TEORI

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

kepentingan organisasi dari kepentingan pribadinya, sebagai bentuk untuk mencapai tujuan organisasinya serta bertindak sesuai keinginan pemilik organisasi (*participal*) (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini sangat cocok diterapkan pada organisasi

kepemerintahan karena lebih cenderung dalam memberikan pelayanan ke masyarakat bukan ke laba (Perdana, 2018). Prinsip yang digunakan *steward* (pemerintah) adalah *steward* merasa mempunyai tanggung jawab besar dalam alokasi dan pengelolaan sumber daya yang ada dengan bijaksana untuk pemenuhan keinginan pribadinya, tetapi dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas *steward* merasa aktualisasi diri dengan meningkatkan dan mendapatkan kepercayaan publik (Alfasadun, *et al.*, 2018).

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) berpendapat *agency theory* merupakan teori untuk menerangkan hubungan kontraktual antar pihak yang terlibat, terutama pengukuran akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Pengertian tersebut menunjukkan adanya pertentangan dan perbedaan dalam teori agensi yang menyebabkan konflik antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Dalam instansi pemerintah menjelaskan bahwa masyarakat desa sebagai *principal* atas kinerja perangkat desa sebagai *agent*. *Agency Theory* didasarkan pada beberapa asumsi yang dibedakan atas tiga asumsi yaitu:

1. Asumsi kepribadian manusia menerangkan manusia memiliki kepribadian egois, manusia punya keterbatasan pada pola pikir pada hal yang akan datang serta masa yang telah lalu untuk menghindari resiko.
2. Asumsi keorganisasian merupakan konflik yang terjadi antar anggota organisasi mengenai efisiensi, efektivitas serta keterbatasan informasi antara *agent* dan *participal*.
3. Asumsi pemberitahuan yaitu dimana pemberitahuan dianggap sebagai alat komoditas yang bisa dijual dan dibeli (Kusumawati, 2012).

Komitmen Organisasi Perangkat Desa

Komitmen organisasi menimbulkan rasa tanggung jawab serta kesadaran dalam menjalankan seluruh aktivitas organisasi dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya (Zeyn, 2011). Menurut Mathis & Jackson (2008) Keikutsertaan organisasi adalah level keyakinan individu sebagai penerimaan terhadap maksud kelompok, dan keinginan untuk tetap di dalam kelompok tersebut. Komitmen organisasi berperan penting bagi suatu individu dan organisasi dimana individu tersebut berada dan membuat anggotanya merasa nyaman.

Partisipasi Masyarakat

Sangat penting bagi pemerintah mengikutsertakan masyarakat untuk membantu dan mengawasi jalannya pemerintahan, bukan hanya itu partisipasi masyarakat juga penting dalam menjalankan proses pembangunan dan pengelolaan dana. Menurut Putra & Rasmini (2019) tujuan dari partisipasi tidak lain guna menambah kesiapan seseorang yang bersangkutan secara serta merta maupun tidak pada pembentukan dalam mengambil keputusan atas pengawasan dalam segala kegiatannya.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia (2000) bahwa tindakan untuk memberikan tanggung jawab atas apa yang telah dilaksanakan oleh seorang kepada pihak yang mempunyai hak atas hal tersebut. Akuntabilitas sangat diperlukan oleh perangkat desa yang memberikan informasi dapat berupa laporan pertanggungjawaban keuangan secara realisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat menilai atas kinerja pemerintah desa (Gayatri, 2019). Pengelolaan dana desa dengan pertanggungjawabannya sangat dibutuhkan sebagai sarana pendorong berjalannya tujuan dengan baik, handal dan dapat dipercaya, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan (Komang *et al.*, 2014).

Whistleblowing system

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) menjelaskan bahwa *whistleblowing* sebagai wadah untuk mengungkap tindakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan dan melanggar moral ataupun perilaku yang memberikan kerugian suatu organisasi, yang diperbuat oleh anggota organisasi ataupun pemangku jabatan organisasi yang dapat melakukan tindakan tersebut. Menurut Taufik & Nasir (2020) pengungkapan *whistleblowing* juga dilakukan dengan rahasia. Pelaporan tindakan tersebut juga harus dengan niat yang baik dan bukan atas keinginan serta keluh kesah pribadi mengenai kebijakan suatu organisasi.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Robbins and Judge (2013) berpendapat bahwa keterkaitan merupakan situasi seseorang memilih atas maksud dan dorongan bertahan dalam kedudukan lembaga tersebut. Keterkaitan bisa diartikan pula sebagai loyalitas anggota dalam instansi pemerintah dalam organisasi, penerimaan terhadap pekerjaan dan nilai-nilai tujuan organisasi yang salah satunya berorientasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen organisasi sangat berkaitan terhadap akuntabilitas dan kinerja seluruh anggota organisasi. Menurut Brown & Moore, (2001) perubahan yang besar timbul dari manajerial lembaga dengan keterkaitan individu serta melaksanakan pekerjaan dari pada hanya melihat dan memperhatikan konsistensi. Komitmen organisasi yang tinggi pada organisasi maka dengan otomatis anggota organisasi merasa memiliki tanggung jawab dan harus melaksanakannya dan dikerjakan dengan maksimal, sehingga akuntabilitas bisa terlaksana secara teratur dan sesuai pada kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta masyarakat akan dapat menilai apakah kinerja organisasi tersebut baik atau buruk.

Hal ini didukung oleh penelitian dari Tarjo (2019) dan Dewi (2019) bahwa komitmen organisasi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

H1: Komitmen organisasi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Keikutsertaan masyarakat diartikan sebagai seseorang, suatu kelompok, atau masyarakat yang ikut serta dalam kontribusi atau memberikan sumbangan agar menunjang berhasilnya program dalam berbagai partisipasi. Keterlibatan dalam suatu tujuan terhadap adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab bersama. Apabila dalam pengambilan dan pembuatan keputusan tanpa melibatkan masyarakat maka akan bermunculan rasa curiga yang dirasakan masyarakat serta asimetri informasi antara masyarakat desa (*participal*) dan perangkat desa (*agen*). Dengan partisipasi masyarakat, maka masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi langsung keputusan-keputusan yang diambil dan berhak untuk menolak atas pengambilan kebijakan penyusunan dana desa yang dirasa masyarakat tidak sesuai dengan tujuan bersama (Putra & Rasmini, 2019). Wardani, D.K., & Utami, 2020) semakin tinggi keterbukaan yang dilakukan suatu lembaga atas usulan serta masukan rakyat akan memiliki mempengaruhi terhadap sejahteranya rakyat dan semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hal ini didukung oleh penelitian dari Julianto (2019) dan Rasmini (2019) yang menunjukkan keikutsertaan masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

***Whistleblowing system* memperkuat pengaruh positif komitmen organisasi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa**

Tingginya komitmen pada perangkat desa maka manajerial pendanaan desa pun akan semakin tinggi, penerapan *whistleblowing system* yang baik dapat membuka akses informasi yang sesungguhnya kepada masyarakat desa atas pengelolaan dana desa. Penerapan *whistleblowing system* diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, dengan mekanisme yang baik dan jelas dalam penerapan *whistleblowing system* dapat mendorong *whistleblower* lebih yakin dan berani melakukan pelaporan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Menurut Wahyuningsih (2016) Bila keterkaitan pada individu tinggi maka akan memunculkan rasa keterkaitan dan menjadi bagian dari organisasi, sehingga perangkat desa tidak merasa yakin bila melakukan pelaporan, sebab dia meyakini jika perbuatan itu dapat menjadi pelindung organisasi terhadap hal buruk kedepannya, jika keterkaitan individu tinggi maka akan meningkat juga tindakan

pelaporan yang dilakukan yang bertujuan untuk melindungi instansi. Bila anggota organisasi mempunyai keterkaitan pada instansi tinggi, maka akan meningkat dalam mengelola lembaga tersebut (Gagali, 2019). Penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

H3: *Whistleblowing system* memperkuat pengaruh positif komitmen organisasi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

***Whistleblowing system* memperkuat pengaruh positif partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa**

Menurut Saputra & Utami, (2018) pentingnya *whistleblowing system* untuk mendukung pengungkapan kecurangan yang ada pada lingkungan pemerintahan, sistem pelaporan kecurangan membuka kesempatan bagi masyarakat dalam memperhatikan manajerial pendanaan desa serta kerja perangkat desa dengan tingkat pencatatan akuntansi serta transparansi dari pengelolaan laporan keuangan. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan laporan keuangan bisa menyebabkan manajerial pendanaan desa akan bertambah baik. Semakin meningkatnya keikutsertaan warga dalam mengatur pendanaan, akan meningkat pula juga manajerial dan pendanaan desa. Adanya *whistleblowing system* begitu penting dalam pemerintahan untuk mengungkap tindakan kecurangan yang terjadi dan dilakukan dalam pemerintahan. Menurut Yarry & Dadang (2010) penerapan efektifitas sistem pelaporan dapat membawa warga serta anggota organisasi dapat melakukan tindakan terhadap pencegahan penyelewengan dengan melaporkan kepada kelompok yang memiliki wewenang, dengan itu adanya sistem pelaporan tersebut akan meningkatkan kejujuran dan keterbukaan. *Whistleblowing system* jika digunakan dengan baik oleh anggota organisasi dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya kecurangan. Penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

H4: *Whistleblowing system* memperkuat pengaruh positif partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data primer merupakan data yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif, kuesioner sebagai sumber informasi penelitian. Perangkat desa yang ada pada Kecamatan Sukorejo merupakan Populasi pada penelitian ini. *Convenience sampling* merupakan metode yang digunakan dalam

pengambilan sampel. 104 responden digunakan dalam peneloitian merupakan perangkat desa di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.

Metode Analisis dan Hipotesis Penelitian

Uji ststistik deskriptif merupakan salah satu pengujian yang digunakan, pengujian analysis regresi linier berganda, damn uji *moderate regression analysis* (MRA). Uji hipotesis pada penelitian ini guna mengetahui variabel Y yang dipengaruhi oleh variabel X, sedangkan pengujian moderasi menggunakan uji *moderate regression analysis* (MRA).

Operasional Variabel Penelitian

Dua variabel X digunakan dalam penelitian ini, satu variabel Y, serta satu variabel moderasi.

1. Komitmen Organisasi Perangkat Desa

Keterkaitan anggota lembaga merupakan pemicu bagi anggota lembaga guna melakukan suatu tindakan agar dapat mencapai keberhasilan dari tujuan organisasi dan lebih mementingkan kepentingan organisasi (Yuniarti & Saty, 2019). Menurut Robbins and Judge (2013) berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan keadaan seseorang memihak organisasi atas alasan dan kemauan bertahan dalam kelompok lembaga tersebut. Keterkaitan bisa diartikan pula sebagai loyalitas anggota dalam instansi pemerintah dalam organisasi, penerimaan terhadap pekerjaan dan nilai-nilai tujuan organisasi yang salah satunya berorientasi memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan keikutsertaan warga saat fase identifikasi permasalahan serta kapasitas yang dimiliki oleh warga memilih serta mencari solusi dalam penyelesaian suatu hal, dan melakukan segala upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada serta mengikuti evaluasi perubahan yang ada (Muslimin *et al.*, 2012). Partisipasi masyarakat diartikan sebagai seseorang, suatu kelompok, atau masyarakat yang ikut serta dalam kontribusi atau memberikan sumbangan agar menunjang berhasilnya program dalam berbagai partisipasi.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas yaitu perbuatan untuk mempertanggungjawabkan kinerja, berupa penyajian laporan kepada pihak yang berkepentingan dan terkait (Wicaksono, 2015).

4. Whistleblowing System

Whistleblowing system adalah suatu sarana dalam pengendalian internal yang digunakan sebagai pengungkapan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di

dalam suatu organisasi (C. A. Wardani, 2017). Sistem pelaporan bukan saja menjadi penghubung pengaduan kecuranagn tetapi merupakan pengawas tindakan ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis menggunakan anaysis regresi berganda untuk menunjukkan fungsi hubungan satu variabel terikat. Analisis regresi linier berganda yang diuji melalui nilai signifikan sebesar 0,05 atau 5%.

1. Analisis Regresi Linier Berganda.

a. Uji Fit Model.

Pengujian (F). ANOVA^a

<i>Model.</i>	<i>Sum Of Squares.</i>	<i>df.</i>	<i>Mean Squares.</i>	<i>F.</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	.404	3	.202	45.102	.000 ^b
<i>1 Residual</i>	.452	101	.004		
<i>Total</i>	.855	103			

a. *depentent variabel: Transformasi_TotalY*

b. *predictors: (constnt), Transformasi_TotalX3,Transformasi_TtotalX1, Transformasi_TotalX2*

Sumber Data: Data Primer, 2021, Diolah dengan SPSS.v20

Berdasarkan uji F dari tabel diatas, menunjukkan bahwa F bernilai 61.638 serta nilai signifikannya $0.000 < 0.05$ artinya dinyatakan signifikan, sehingga uji F dalam penelitian *fit*.

Pengujian T Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandarized Coefficients.</i>		<i>Standarized Coefficients.</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std.Error.</i>	<i>Beta</i>		
<i>1 (Constant)</i>	1.219	.282		4.318	.000
<i>Transformasi_TotalX1</i>	.162	.079	.157	2.038	.044
<i>Transformasi_TotalX2</i>	.504	.063	.616	7.988	.000

a. *Dependent Variable: Transformasi_TotalY*

Sumber Data: Data Primer, 2021, SPSS.v20

Berdasarkan pada uji T diatas, menunjukkan bahwa t hitung variabel X1 bernilai 2.038, yang menandakan bahwa nilai t tabel lebih kecil yaitu 1.659 dan disimpulkan tidak adanya pengaruh terhadap variabel Y. Variabel X2 pada tabel diatas

menunjukkan nilai t-hitung 7.988, nilai t tabel lebih besar yaitu 1.659, dan disimpulkan variabel X2 mempunyai berpengaruh pada variabel Y.

Pengujian Deterimnasi (R²).

Model Summary.

<i>Model.</i>	<i>R.</i>	<i>R. Square.</i>	<i>Adjusted R .Square.</i>	<i>Std. Error of the Estimate.</i>
1	.687	.472	.461	.06689

a. *Predictors: (Constant), Transformasi_TotalX2, Transformasi_Total_X1*
Sumber Data: Data Primer, 2021, Diolah dengan SPSS.v 20

Berdasarkan pada hasil uji diatas, dengan nilai sebesar 0.472 atau 47,2% pada R square. Menyatakan kedua variabel independen yang mempunyai pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengujian Moderated regression analisis (MRA) ke-1

a. Uji Fit Model

**Pengujian (F).
ANOVA^a.**

<i>Model.</i>	<i>Sum Of Squares.</i>	<i>df.</i>	<i>Mean Squares.</i>	<i>F.</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	.181	3	.060	8.960	.000 ^b
<i>l</i>	.674	100	.007		
<i>Residual.</i>					
<i>Total.</i>	.855	103			

a. *depentent variable: Transform_TotalY*

b. *predictions: (constsnt), TotalXIZ, Transform_totalX1, TotalZ*

Sumber Data: Data Primer, 2021, Diolah dengan SPSS 20

Model penelitian tersebut dianggap fit, karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel. pada variabel independen dan moderasi terhadap variabel dependen signifikanya bernilai 0.000 dan nilai F hitungnya sebesar 8.960 serta nilai F tabel yaitu 2.69.

**Pengujian T.
 Coefficients^a**

<i>Model.</i>	<i>Unstandarized. Coefficients.</i>		<i>Standardized .Coefficients</i>		<i>t.</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std.Error.</i>	<i>Beta</i>			
(<i>Cosntant</i>)	24.320	14.460			1.682	.096
Total_X1	-6.345	4.232	-6.175		-1.499	.137
Total_Z	-6.073	.793	-5.574		-1.524	.131
TotalX1Z	1.852	.026	8.907		1.588	.115

a. Dependent variable: Transformasi Total_Y

Sumber Data: Data Primer, 2021, Diolah dengan SPSS.v 2

Berdasar uji signifikansi pada diatas, menunjukkan bahwa *whistleblowing system* tidak memoderasi pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. dibuktikan nilai signifikansi variabel komitmen/keterikatan organisasi perangkat desa sebesar 0.137. Variabel *whistleblowing system* sebesar 0.131 serta variabel komitmen/keterikatan organisasi perangkat desa bernilai 0.115 > 0.05, maka variabel *whistleblowing system* tidak memoderasi hubungan komitmen/keterikatan organisasi perangkat desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari t hitung bernilai 1.588, sehingga memperkuat hubungan komitmen/keterikatan organisasi perangkat desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga pernyataan hipotesis *whistleblowing system* memperkuat pengaruh positif komitmen/keterikatan organisasi perangkat desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa ditolak.

**Pengujian Determinansi (R²)
 Model Summary**

<i>Model.</i>	<i>R.</i>	<i>R Square.</i>	<i>Adjusted R. Square.</i>	<i>Std Error of the Estimate.</i>
1	.460 ^a	.212	.188	.08211

a. Predictors: (constant), TotalX1Z, Total_X1, Total_Z

Sumber Data: Data Primer, 2021, Diolah dengan SPSS 20

Berdasarkan pada pengujian determinasi (R²), menjelaskan *Adjusted. R. Square* bernilai 0.460 sama dengan 46,0%. Dengan demikian disimpulkan *whistleblowing system* mampu memprediksi komitmen/keterikatan organisasi perangkat desa sebesar 46,0% sedangkan 54,0% dipengaruhi oleh faktor yang lain.

3. Pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) ke-2

a. Uji Fit Model

Pengujian (F)
ANOVA^a

<i>Model.</i>	<i>Sum Of Squares.</i>	<i>df</i>	<i>Mean. Squares</i>	<i>F.</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	.474	3	.158	41.480	.000 ^b
<i>1 Residual</i>	.381	100	.004		
<i>Total</i>	.855	103			

a. dependent variable: *Total_Y*

b. predictors: (*constnt*), *TotalX2Z*, *total_X2*, *Total_Z*

Sumber Data: *Data Primer, 2021, Diolah dengan SPSS 20*

Berdasarkan pengujian model diatas, menunjukkan tingkat signifikansi 0.000 serta nilai F hitung 41.480. Jika nilai F hitung nilainya lebih besar dari pada F tabel, dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 2.69. Sehingga dapat dikatakan bahwa model *fit*.

Pengujian T.
Coefficients^a

<i>Model.</i>	<i>Unstandarized Coefficients.</i>		<i>Standardized Coefficients. Beta.</i>	<i>t.</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B.</i>	<i>Strd.Error</i>			
<i>(Cosntant)</i>	35.890	8.798		4.080	.000
<i>Total_X2</i>	-9.316	2.478	-11.399	-3.760	.000
<i>Total_Z</i>	-9.531	2.449	-8.747	-3.892	.000
<i>TotalX2Z</i>	2.742	.690	15.661	3.976	.000

a. *Dependent variable: Total_Y*

Sumber Data: *Data Primer, 2021, SPSS.v20*

Berdasarkan uji signifikansi pada tabel 4.23, menunjukkan bahwa *whistleblowing system* memoderasi pengaruh partisipasi/keikutsertaan masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dibuktikan bahwa nilai signifikansi variabel partisipasi/keikutsertaan masyarakat sebesar 0.000. Variabel *whistleblowing system* sebesar 0.000 serta variabel partisipasi/keikutsertaan masyarakat mempunyai nilai 0.000, nilai tersebut lebih kecil dari pada 0.05, maka variabel *whistleblowing system* dapat memoderasi hubungan partisipasi/keikutsertaan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari t-hitung bernilai positif sebesar 4.595, sehingga memperkuat hubungan partisipasi/keikutsertaan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa

whistleblowing system memperkuat pengaruh positif partisipasi/keikutsertaan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima.

Pengujian Determinansi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	.745 ^a	.554	.541	.06174

a. Predictors: (constant), TotalX1Z, Total_X1, Total_Z

Sumber Data: Data Primer, 2021, Diolah dengan SPSS 20

Berdasarkan pada hasil pengujian diatas, menunjukkan *Adjusted R. Square*. Sebesar 0.541 sama dengan 54,1%. Dengan demikian disimpulkan bahwa variabel *whistleblowing system* dapat memprediksi variabel partisipasi/keikutsertaan masyarakat bernilai 51,1% serta 48,9% disebabkan karena hal yang lainnya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi

Rekomendasi dari penelitian ini, berdasar pada hasil pengujian diatas maka:

- 1) Hasil Penelitian menjelaskan bahwa komitmen/keterikatan organisasi tidak memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi keterikatan yang dimiliki perangkat desa, kerja dan tanggung jawab yang dilakukan oleh anggota lembaga akan membaik pula. Begitu pula sebaliknya, jika keterkaitan yang dimiliki anggota lembaga rendah, kinerja dan tanggung jawab yang dilakukan akan semakin rendah dan buruk.
- 2) Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Keikutsertaan warga sangat mempengaruhi pada jalannya kegiatan pemerintahan desa, sehingga saran, ide, serta tanggapan masyarakat berguna sebagai tolak ukur apakah kegiatan pemerinah desa sudah baik ataupun belum. Masyarakat secara tidak langsung memiliki andil sebagai pengawas kegiatan dan kinerja pemerintah desa. Semakin keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemerintah desa, semakin tinggi pula keberhasilan dalam kegiatan pemerintah.
- 3) *Whiatleblowing system* tidak dapat memoderasi komitmen organisasi perangkat desa, *whistleblowing system* sebagai salah satu bentuk pengendalian internal dalam organisasi begitu penting untuk organisasi agar berlangsung secara baik dan teratur. Namun, *whistleblowing* belum tentu akan mengubah dan menjadikan komitmen organisasi setiap anggota organisasi akan tinggi karena memang setiap anggota organisasi memiliki pemikiran, sikap dan juga karakter

yang berbeda, hal tersebut yang menjadikan tinggi atau rendah komitmen organisasi pada perangkat desa.

- 4) *Whistleblowing system* memoderasi pengaruh positif partisipasi/keikutsertaan masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi serta keikutsertaan warga sebagai pengawas jalannya pemerintahan desa, Dengan adanya *whistleblowing system* masyarakat akan lebih mudah dalam mengawasi dan melaporkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa. Masyarakat akan lebih berani melaporkan tindakan kecurangan melalui *whistlenlowing system*, karena dengan menggunakan *whistleblowing system* laporan masyarakat tidak akan diketahui oleh orang lain.

Kebijakan

Penelitian ini meneliti pengaruh komitmen/keterikatan organisasi perangkat desa serta partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan *whistleblowing system* sebagai variabel moderasi. Berdasarkan pada hasil penelitian ini, saran yang diberikan peneliti yaitu:

1. Peneliti berikutnya diharapkan bisa menambah variabel terkait, moderasi maupun *intervening* yang berkaitan dengan pembangunan desa, integritas perangkat desa dan lainnya.
2. Diharapkan lebih menambahkan banyak sampel pada peneliti berikutnya supaya hasil data dapat bisa meyakinkan untuk diolah.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperluas jangkauan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfasadun, Hardiningsih P, Ratnasari S R, C. S. 2018. *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa*. 978–979.
- Anggi Saputra, Intiyas Utami, I. K. 2018. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Potensi Whistleblowing Atas Penyalahgunaan Dana*. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(1), 13–28.
- Anita Mei Kusumawati. 2012. *Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Manajerial (Survey Pada Kantor Cabang Pt. Telkom Indonesia Di Surakarta)*.
- Brow. L D, & Moore, M. H. 2001. *Accountability, Strategy, and International Nongovernmental Organizations*. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 30(3), 569–587.
- Citra Kumala Dewi, Ikbal A, F. M. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan*

- Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. 1(2): 57–64.*
- Donaldson, L & Davis, J H. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16(1): 49–64.*
- Gagali, Y R. 2019. *Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Kompetensi Dan Peran Internal Audit Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Halmahera Utara. 144–156.*
- Gayatri. 2019. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: 26, 1269–1298.*
- Handoko, D S & Rambe, M F. 2018. *Pengaruh Pengembangan Karir dan Kompensasi terhadap Komitmen Organisasi Melalui Kepuasan Kerja, 1(1): 31–45.*
- Julianto, I Putu. 2019. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa, 4(1): 24–42.*
- Komang, A, Lestari, Atmadja, Adiputra, 2014. *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan , Kecamatan Kubutambahan , Kabupaten Buleleng , Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan) .*
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG).
Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI, 2000.
- Mada, S, Kalangi, L & Gamaliel, H. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill”, 8(2): 106–115.*
- Mathis, Robert. L & Jackson. J. H. 2008. *Haman Resource Management (Twelfth Ed). Thamson South Western.*
- Michael. C. Jensen and William H. Meckling. 1976. *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. Human Relations, 72(10): 1671–1696.*
- Muslimin, Mappamiring & Nurmaeta S. 2012. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1):43*
- Nadir. S. 2013. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013. Jurnal Politik Profetik, 1(1): 1621*
- Perdana. K.W. 2018. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.*
- Putra, I. Made. Y. D. Rasmini, N. K. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan*

- Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi*, 28: 132.
- Putra, N. A. S. 2019. *Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*.
- Robbins, S. P. and Judge, T. A. 2013. *Organisational Behavior (15th ed.)*. Pearson. Boston.
- Tarjo. 2019. *Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Pada Desa Muara Niro Kecamatan Vii Koto Kabupaten Tebo)*.
- Taufik, T. & Nasir, A. 2020. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis)*.
- Utami, K. D & Hapsari 2019. *Whistleblowing pengelolaan dana desa: studi atas nilai kearifan lokal. Religación. Revista de Ciencias Sociales Humanidades*, 4(17): 571–579.
- Wahyuningsih, W. 2016. *Pengaruh Pemberian Reward, Komitmen Organisasi, Gender, dan Masa Kerja terhadap Whistleblowing (Studi Empiris pada Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatra Barat)*, 4(1): 1–22.
- Wardani, C. A. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing*, 9(1): 29–44.
- Wardani & Utami. 2020. *Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 28(1): 35–50.
- Wicaksono, K. W. 2015. *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(1): 1–16.
- Yarry Septia Larasati, Dadang Sadeli, S. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa*, 43–60.
- Yuniarti, E., & Saty, F. M. 2019. *Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dan Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Kantor Cabang Perbankan Di Propinsi Lampung)*. *Jurnal Ilmiah ESSAI*, 2(1): 1–16.
- Zeyn, E. 2011. *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Trikonomika*, 10(1): 52–62.